

PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Handika Alfaruq¹, Ni Luh Karmini²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Denpasar, Bali

Email : Andikaskaha190@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Economic development is one of the primary goals for developing countries, including Indonesia. Development is not only related to growth but also to the improvement of welfare, security, and the quality of resources, including human resources and the environment. Economic development and development in other sectors always involve human resources as key development actors; therefore, the population size of a country is a fundamental element in development. Essentially, economic development is not only directed at pursuing high economic growth, but also emphasizes improving education, which can ultimately reduce the unemployment rate, dependency ratio, and alleviate poverty. Poverty is the socio-economic condition of an individual or group of people whose basic rights are unfulfilled to maintain and develop a dignified life. This study aims: 1) to analyze the simultaneous effect of the Open Unemployment Rate, Minimum Wage, and Education Level on the Population Poverty Rate across Regencies/Cities in Bali Province; 2) to analyze the partial effect of the Open Unemployment Rate, Minimum Wage, and Education Level on the Population Poverty Rate across Regencies/Cities in Bali Province. This study employs an associative quantitative approach. The data collection method used is non-participant observation. The results indicate that the Open Unemployment Rate, Minimum Wage, and Education Level simultaneously affect the Population Poverty Rate of Regencies/Cities in Bali Province. Partially, the Open Unemployment Rate has a positive effect on the Population Poverty Rate of Regencies/Cities in Bali Province. The Minimum Wage has no partial effect on the Poverty Rate, while the Education Level partially has a negative effect on the Population Poverty Rate of Regencies/Cities in Bali Province.</i> Keywords: <i>Open Unemployment Rate, Minimum Wage, Education Level</i>

Abstrak

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama bagi negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, serta kualitas sumberdaya termasuk sumberdaya manusia dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan pada peningkatan pendidikan yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat

pengangguran dan rasio ketergantungan (dependency ratio) serta mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis pengaruh simultan Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum dan Tingkat pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2) Untuk menganalisis pengaruh parsial Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum dan Tingkat pendidikan secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengangguran Terbuka, Upah Minimum dan Tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial berpengaruh secara positif terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Upah Minimum tidak berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pendidikan secara parsial berpengaruh secara negatif terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: *Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan*

A. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, penggunaan gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak usia sekolah. Perangkat seperti ponsel, tablet, dan laptop sering digunakan untuk berbagai aktivitas, baik sebagai sarana hiburan maupun untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan gadget yang berlebihan sering kali menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan konsentrasi belajar anak. Kemudahan akses terhadap berbagai aplikasi dan konten digital dapat mengalihkan perhatian anak dari tugas akademik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi performa belajar mereka.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama bagi negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, serta kualitas sumberdaya termasuk sumberdaya manusia dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya.

Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka Sukirno (2011:331).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan pada peningkatan pendidikan yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan rasio ketergantungan (dependency ratio) serta mengentaskan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006:95). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi maka makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Berhasil atau tidaknya pembangunan daerah ditentukan oleh beberapa indikator diantaranya pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Murjana Yasa, 2017).

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Arsyad (2010) mengemukakan kemiskinan dapat ditinjau dari dua dimensi, Pertama, kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang berdasarkan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang merupakan sebuah patokan seseorang untuk hidup secara layak. Seseorang termasuk dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kedua, Kemiskinan Relatif kemiskinan yang dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial, sering terjadi fenomena dimana seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata

pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Kemiskinan menjadi masalah utama negara sedang berkembang, tak terkecuali Indonesia. Masalah kemiskinan jika tidak dapat ditanggulangi secara sungguh-sungguh selain dapat menimbulkan kerawanan sosial politik, juga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengamatan dan pengukuran gejala kemiskinan harus terus dilakukan dari waktu ke waktu. Konsep kemiskinan ini identik dengan kekurangan, kesulitan dan ketidakberdayaan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Semakin tinggi jumlah dan presentase penduduk miskin di suatu daerah akan meningkatkan beban pembangunan. Karena itu, pembangunan dikatakan berhasil apabila jumlah dan presentase penduduk miskin akan semakin sedikit (Siregar, 2019).

Konsep kemiskinan telah diterima sebagai fenomena multidimensional oleh berbagai disiplin ilmu dan bahkan telah dimasukkan ke dalam agenda pembangunan, pengukuran dan pengaplikasiannya secara multidimensi masih terbatas (Mohanty, 2011). Ada beberapa penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Sharp, et al (1996) dalam Mudrajat Kuncoro (2004).

Berbagai kebijakan program pembangunan ekonomi telah dilakukan Indonesia guna mempercepat laju pengentasan kemiskinan (Silva dan Sumarto, 2014). Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah menerapkan sejumlah program perlindungan sosial yang ditargetkan langsung ke rumah tangga miskin, termasuk program subsidi beras, Raskin / BPNT, dan pendahulunya, Raskin dan OPK; program transfer tunai langsung, BLT dan BLSM; dan program CCT, PKH dan BSM, dan lain sebagainya (Olken, 2019).

Provinsi Bali masih memiliki penduduk miskin, meskipun kemiskinan di Provinsi Bali tergolong rendah jika dibandingkan kemiskinan Nasional. Dilihat dari urutannya, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan perekonomian yang pesat.

Namun di tengah pesatnya perkembangan perekonomian tersebut masih ditemukan jumlah penduduk miskin. Provinsi Bali mempunyai struktur perekonomian yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Keunikan ini disebabkan karena sumber pendapatan sebagian besar penduduk Bali adalah dari sektor pariwisata, sedangkan sektor lain hanya berperan sebagai sektor pendukung. (BPS, 2003).

**Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Bali Tahun 2017-2024**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	5,38	5,20	4,88	4,51	5,06	5,30	4,96	4,51
Tabanan	4,92	4,46	4,21	4,27	5,12	5,18	4,70	4,40
Badung	2,06	1,98	1,78	2,02	2,62	2,53	2,30	2,23
Gianyar	4,46	4,19	3,88	4,08	4,85	4,70	4,47	4,00
Klungkung	6,29	5,86	5,40	4,87	5,64	6,07	5,61	5,30
Bangli	5,23	4,89	4,44	4,19	5,09	5,28	5,28	5,06
Karangasem	6,55	6,28	6,25	5,91	6,78	6,98	6,56	6,52
Buleleng	5,74	5,36	5,19	5,32	6,12	6,21	5,85	5,39
Denpasar	2,27	2,24	2,10	2,14	2,96	2,97	2,68	2,59
Provinsi Bali	4,53	3,78	3,79	4,01	4,25	4,57	4,25	4,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Bali dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Rata-rata persentase penduduk miskin paling banyak dijumpai di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 6,52 persen tahun 2025. Sebaliknya, persentase penduduk miskin yang paling sedikit adalah Kabupaten Badung yaitu sebesar 2,23 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakmerataan persebaran persentase penduduk miskin di Provinsi Bali periode 2017 hingga 2024.

Selama satu dekade terakhir Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, pemerintah sadar bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai masyarakat adil dan makmur (Sumarto, 2014). Selain itu, penurunan pengangguran diharapkan juga mampu menurunkan jumlah kemiskinan. Orang-orang yang belum memiliki pekerjaan dituntut untuk segera mencari pekerjaan agar mampu keluar dari masalah kemiskinan. Menanggapi masalah pengangguran, pemerintah telah memberlakukan

kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran dan memberikan manfaatnya kepada pengangguran (Herbert, 1998).

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan kemiskinan. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangun ekonomi dalam jangka panjang Sukirno dalam Yogatama, (2010:34).

Selama satu dekade terakhir Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, pemerintah sadar bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai masyarakat adil dan makmur (Sumarto, 2014). Selain itu, penurunan pengangguran diharapkan juga mampu menurunkan jumlah kemiskinan. Orang-orang yang belum memiliki pekerjaan dituntut untuk segera mencari pekerjaan agar mampu keluar dari masalah kemiskinan. Menanggapi masalah pengangguran, pemerintah telah memberlakukan kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran dan memberikan manfaatnya kepada pengangguran (Herbert, 1998).

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu negara karena terjadi ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia Jundi (2014).

Penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan sarana serta prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Salah satu kriteria dari kemiskinan yang umum digunakan dan diterima secara luas adalah rendahnya pendapatan karena pendapatan mencerminkan standar rill masyarakat. Standar hidup rill masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat (Mubyarto, 1996).

Upah rendah yang diterima oleh masyarakat berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat di suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber

daya manusia yang rendah secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sering dikaitkan oleh ketrampilan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pelatihan serta pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi penentuan besar pendapatan yang diterima masyarakat, apabila faktor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat miskin akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun temurun (Sumarsono, 2003:11). Masalah kependudukan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi hampir semua negara berkembang di dunia. Khususnya akibat tingkat tingkat pendidikan (kelahiran) yang tinggi. Pada saat ini di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia, mengupayakan penurunan tingkat tingkat pendidikan (Febriyanti, 2017).

Afzal (2012) menyebutkan pendidikan memiliki pengaruh dan manfaat yang besar terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya investasi dalam bidang pendidikan, selain itu peningkatan dalam kualitas pendidikan akses yang mudah dalam memperoleh pendidikan. Tingkat pendidikan yang memadai akan memperbesar kesempatan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Terdapat hubungan yang kuat antara pendidikan dan kemiskinan, dimana melalui pendidikan dapat mengurangi kemiskinan, sedangkan kemiskinan dapat membatasi akses terhadap pendidikan (Anderson, 2012).

Pendidikan berkenaan dengan pengembangan pengetahuan serta keahlian dan keterampilan dari manusia maupun tenaga kerja dalam proses pembangunan. Berhubung dengan kontribusinya yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi, maka pendidikan dikatakan sebagai modal manusia (human capital). Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Sudiharta dan Sutrisna, 2014).

Todaro (1994:248) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Seorang miskin yang mengharap pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya, orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ketingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas. Dengan demikian tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan. Di sisi lain, jika kemiskinan tidak diatasi maka untuk mencapai pendidikan yang bermutu sangat sulit, karena di zaman yang modern

ini dunia kerja membutuhkan sumber daya yang berkualitas dan kemampuan bersaing. Manusia perlu pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi, dan dapat mandiri melaluipendidikan. Produktivitas kerja memerlukan pengetahuan, ketrampilan dan penguasaan teknologi. Dengan tingkat pendidikan tinggimaka kinerja karyawan akan menjadi lebih baik dan tujuan dari perusahaan akan tercapai dengan sempurna (Uyoh, 2006:57).

Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pengangguran. Faktor pendorong diakibatkan karena memungkinkan banyaknya tenaga kerja, lalu bisa juga disebabkan oleh perluasan pasar, karena perluasan pasar itu diakibatkan dua faktor penting yaitu jumlah pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar justru akan memperparah tingkat kemiskinan. Fakta menunjukan, dikebanyakan negara dengan jumlah penduduk yang besar tingkat kemiskinannya juga lebih besar jika dibandingkan dengan negara dengan jumlah penduduk sedikit. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator tujuannya melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan (Sukirno,1997:68).

Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi disektor – sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar, 2008).

Jumlah penduduk adalah salah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Namun ahli ekonomi lain yaitu Robert Malthus menanggapi bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak

tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Penduduk (pertumbuhan penduduk yang pesat) dapat menghantarkan dan mendorong pengurasan sumberdaya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan (Mudrajad Kuncoro,1997).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh tiga variabel yaitu Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Dan Tingkat pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Data-data yang digunakan merupakan data yang dikeluarkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan objek penelitian dan kajian-kajian teori yang ada pada penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, Alasan peneliti memilih Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian, dikarenakan peneliti ingin melihat permasalahan lebih lanjut terkait dengan variabel Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali dan ingin meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel independen yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Obyek pada penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Tingkat pendidikan, data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2017-2023. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (X1), Upah Minimum (X2), Tingkat pendidikan (X3). Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan Penduduk (Y). Penelitian ini menggunakan data time series dengan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X1), Upah Minimum (X2), Tingkat pendidikan (X3), dan Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Y) dalam kurun waktu 7 tahun (2017-2023) dengan memakai 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tiga variabel yang dikumpulkan sehingga jumlah pengamatan yaitu 63. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Dan Tingkat pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali terkait data Pengaruh Tingkat Pengangguran

Terbuka, Upah Minimum Dan Tingkat pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda sebagai alat ekonometrika untuk menggambarkan karakteristik dari sebuah sampel ataupun lokasi yang diamati dengan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 25 for Windows.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL

Statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yaitu jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean dan standar deviasi. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis statistic deskriptif dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	63 .40	7.90	3.0003	2.17194
X2	63 1.96	3.16	2.4914	.28149
X3	63 5.52	11.52	8.5498	1.56967
Y	63 1.78	6.98	4.6138	1.41126
Valid N (listwise)	63			

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa jumlah data (n) yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 63 data. Adapun jumlah variabel independen (bebas) pada penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (X1), Upah Minimum (X2) dan Tingkat pendidikan (X3) serta satu variabel dependen (terikat) yakni Tingkat Kemiskinan Penduduk (Y).

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel, pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil olah data dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

<i>Unstandardized Residual</i>	
<i>Test Statistic</i>	0,069
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa besarnya nilai Test Statistic pada model regresi adalah 0.069 dengan tingkat signifikansi pada Asymp.sig (2- tailed) yaitu sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tes uji normalitas pada penelitian ini adalah berdistribusi normal.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual pada masa sebelumnya (t-1) dengan data sesudahnya t(1). Model uji yang baik adalah terbebas autokorelasi. Identifikasi adanya autokorelasi dalam model regresi pada penelitian ini dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS ver 25 for windows. Hasil olah data dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

R	Adjusted	RStd. Error	Estimate of TheDurbinWatson
Square	Square	Estimate	
0,789	0,779	0,66396	1,752

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Tabel 4 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,752. Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan jumlah data (n)= 63 dan banyak variabel bebas 3 diperoleh nilai upper boune (du) sebesar 1,650 dan 4-du sebesar 2,350. Dengan menggunakan analisis nilai Durbin-Watson didapatkan hasil nilai $du < dw < 4-du$ dapat dilihat $1,650 < 1,752 < 2,350$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi dalam model.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam suatu model. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian yang dilakukan dengan bantuan program SPPS ver 25 for windows ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Variance Inflation Factor (VIF)

Variabel	<u>Collinearity Statistics</u>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)	0.685	1.460
Upah Minimum (X2)	0.581	1.721
Tingkat pendidikan (X3)	0.732	1.366

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Tabel 5 menunjukkan bahwa untuk semua variabel independen yang digunakan memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Tingkat pengangguran terbuka (X1) sebesar 0.685, upah minimum (X2) sebesar 0.581 dan tingkat pendidikan (X3) sebesar 0.732. Nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10. Tingkat pengangguran terbuka (X1) sebesar 1.460, upah minimum (X2) sebesar 1.721 dan tingkat pendidikan (X3) sebesar 1.366. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui bahwa pada model regresi terjadi ketidaksamaan variab. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan model uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi seluruh variabel bebas terhadap absolutresidual. Jika variabel bebas yang diteliti tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap residual absolut berarti model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hasil olah data menggunakan bantuan program SPSS ver 25 for windows dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Variabel	Sig
Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)	0.441
Upah Minimum (X2)	0.124
Tingkat pendidikan (X3)	0.809

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Tingkat pengangguran terbuka (X1) sebesar 0,441, upah minimum (X2) sebesar 0,124 dan tingkat pendidikan (X3) sebesar 0,809 memiliki nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Tingkat pengangguran terbuka (X1), upah minimum (X2) dan tingkat pendidikan (X3) terhadap tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Coefficient
<i>R</i>	0.888 ^a
<i>R Square</i>	0.789

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Besarnya R^2 diperoleh sebesar 0,789 dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan tingkat pendidikan, terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali secara simultan adalah sebesar 78,9%. Sedangkan sisanya sebesar 21,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas yaitu tingkat pengangguran terbuka (X1), upah minimum (X2), tingkat pendidikan (X3), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Y) digunakan Uji F. Hasil dari uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig	
1	Regression	97.473	3	32.491	73.703	.000 ^b
	Residual	26.009	59	.441		
	Total	123.482	62			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Berdasarkan hasil output SPSS, F_{Hitung} sebesar 73,703 lebih besar dari F_{Tabel} sebesar 2,75 oleh karena $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Uji hipotesis atau uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Hasil dari uji F dalam penelitian ini

dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Coefficients^a

<u>Unstandardized Coefficients</u>		<u>Standardized Coefficients</u>			
Model B	Std. Error		Beta	t	Sig.
1					
(Constant)	11.216	.842		13.325	.000
X1	.099	.047	.152	2.104	.040
X2	.143	.393	.029	.364	.717
X3	-.849	.063	-.944	-13.512	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut: $Y = 11,216 + 0,099 (X1) + 0,143 (X2) - 0,849 (X3)$

PEMBAHASAN

Pengaruh tingkat pengangguran terbuka (X1) terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar $0,040 < 0,05$ dan nilai thitung $2,104 > ttabel 1,66901$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya tingkat pengangguran terbuka (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka (X1) sebesar 0,099 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali akan mengalami kenaikan sebesar 0,099 persen.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alit dan Suidiana (2013), menyatakan apabila pengangguran meningkat maka angka kemiskinan pun akan meningkat pula. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmaraga (2011) menyatakan bahwa kenaikan pengangguran akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan pada daerah tersebut

Pengaruh upah terbuka (X2) terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar $0,717 > 0,05$ dan nilai thitung $0,364 < t_{tabel} - 1,66901$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya upah minimum (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Koefisien regresi variabel upah minimum (X2) sebesar 364 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan upah minimum mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali akan mengalami peningkatan sebesar 0,364 persen namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Studi internasional (data AS) oleh Burkhauser et al, (2023) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dikaitkan dengan peningkatan kecil probabilitas kemiskinan, tetapi hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, kenaikan upah minimum tidak secara meyakinkan menurunkan tingkat kemiskinan dalam berbagai spesifikasi model. Hal serupa disampaikan oleh Febrianti dan Utami (2025) hasil analisis regresi menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum belum secara efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Perihal ini membuktikan kalau upah minimum memiliki kedudukan terbalik tentang meningkatnya angka kemiskinan, dimana upah minimum ialah bagian yang tidak terpisahkan dari kemiskinan.

Pengaruh tingkat pendidikan (X3) terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X3 terhadap Y sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung $-0,849 > t_{tabel} - 1,66901$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya tingkat pendidikan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Koefisien regresi variabel tingkat pendidikan (X3) sebesar -0,849 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan upah minimum mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali akan mengalami penurunan sebesar 0,849 persen

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan dan Wenagama (2017) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai

keterkaitan yang erat terhadap pengurangan kemiskinan, dimana jika tingkat pendidikan naik maka kemiskinan akan menurun. Selanjutnya Murjana Yasa dan Adi Parwa (2019) memberikan hasil tingkat pendidikan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2016.

Nugroho (2015) memperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya dan akan mengurangi angka kemiskinan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Megasari, dkk. (2015) yang memperoleh hasil bahwa pengaruh pendidikan (mean years schooling) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka ditarik simpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut. Tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tingkat pengangguran terbuka secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Upah minimum dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pemaparan simpulan di atas antara lain sebagai berikut. Pemerintah diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan atau pendanaan usaha mikro kecil menengah yang dapat mendukung perekonomian. Bagi pemerintah diharapkan mampu untuk menyelaraskan upah sesuai peraturan yang ada, karena masih banyak perusahaan yang mempekerjakan karyawan dibawah upah minimum hanya karena untuk menutupi kekurangan modal perusahaan. Bagi pemerintah diharapkan untuk mampu memberikan stimulus bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

E. REFERENSI

- Afzal, M., Malik, M. E., Begum, I., Sarwar, K., & Fatima, H. (2012). Relationship among education, poverty, and economic growth in Pakistan: An econometric analysis. *Journal of Elementary Education*, 22(1), 23–45.
- Alit, Wiradyatmika A.A. Gde dan Ketut Sudiana. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Anderson, Courtney Lauren. 2013. Opening Doors : Preventing Youth Homelessness Through Housing and Education Collaboration. *Seattle Journal for Social Justice*, 11(2), pp : 457-522.
- Astrini, Myanti dan IB Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Ayu, D. S. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010-2015).
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. (2011). Konsep upah dan ketenagakerjaan. Jakarta: BPS.
- Burkhauser, R. V., McNichols, D., & Sabia, J. J. (2023). Minimum wages and poverty: New evidence from dynamic difference-in-differences estimates (NBER Working Paper No. 31182). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w31182>
- Dahlia, D. dan Siregar. 2008. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi. Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Eka Febrianti & Hapsari Wiji Utami. (2025). Pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap penduduk miskin di Provinsi

Jawa Timur periode tahun 2020–2024. Jurnal Edueco, 8(2).
<https://doi.org/10.36277/edueco.v8i2.366>

- Ery Niswan, Ricola Dewi Rawa, & Dami. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap penduduk miskin di kabupaten bengkayang: analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap penduduk miskin di kabupaten bengkayang. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 7(2), 23–49.
- Febrianti, U. M., & Wenagama, I. W. (2022). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali 2014–2019. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(5), 1621–1645.
- Febriyanti, N. P. V., & Dewi, M. U. (2017). Pengaruh faktor sosial ekonomi dan demografi terhadap keputusan perempuan menikah muda di Indonesia. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 13(2), 108–117.
- Grubel, H. G. (1998). Economic freedom and human welfare: Some empirical findings. *Cato Journal*, 18(2).
- Jundi, M. A. (2014). Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia (Skripsi). Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Megasari, H., Amar, S., & Idris. (2015). Analisis perekonomian dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6), 1–18.
- Mubyarto. (1996). *Pengantar ekonomi pertanian dan pedesaan*. Jakarta: LP3ES.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu makroekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Sharp, A. M., Register, C. A., & Grimes, P. W. (1996). *Economics of social issues*. Chicago: Irwin.
- Silva, Indunil De and Sudarno Sumarto. (2014). Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50 (2), pp.227–242.

- Siregar, H. (2008). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Siregar, Z. dan H. H. E., (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
- Miskin di Kota Sibolga Tahun 2011-2017. Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, XVIII(2).
- Sudiharta, Putu Seruni Pratiwi, and Ketut Sutrisna. "Pengaruh PDRB per kapita, pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Bali." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 3.10 (2014): 431-439.
- Sukmaraga, Prima. 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Tengah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*
- Sukirno, S. (2011). Makroekonomi teori pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Sumarto, S. (2014). Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Usman, S. (2006). Sosiologi: Sejarah, teori, dan metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utami, Hapsari Wiji, and Siti Umajah Masjkuri. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah
- Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga* 28.2 (2018): 105-116.
- Wenagama, I Wayan. 2013. Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.Vol. 18, No. 1: 1410-4628.
- Widiarsana, Made Tomy. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Perkapita, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat KemiskinanKabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, [S.l.], v. 11, n. 5, p. 1973 – 1999, may 2022. ISSN 2303-0178.
- World Bank. (1990). World development report: Poverty. Washington, DC: World Bank.